

**KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Bentuk Komunikasi Pemberdayaan untuk Meningkatkan Partisipasi
Perempuan di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Banyumas)**

Oleh: S. Bekti Istiyanto dan Nuryanti

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Peran kaum perempuan seringkali diabaikan dalam pembangunan masyarakat. Aturan yang mewajibkan adanya kaum perempuan dalam program pembangunan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk peningkatan partisipasi aktif yang pada ujungnya diharapkan mampu memberdayakan potensi kaum perempuan. Proses partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di Desa Tumiyang Banyumas pada awalnya berjalan biasa atau pasif, akan tetapi menjadi berubah ketika peran aktif kaum perempuan dimunculkan secara maksimal. Proses pemberdayaan potensi kaum perempuan ini membutuhkan bentuk komunikasi yang tepat dan sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan berasal dari tokoh perempuan yang terlibat dalam pembangunan, perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya. Data dikumpulkan menggunakan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dapat dikatakan tinggi; terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi kaum perempuan; dan adanya bentuk-bentuk komunikasi pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan partisipasi pembangunan oleh kaum perempuan.

Kata Kunci: *partisipasi, perempuan, program pembangunan, komunikasi pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada hakikatnya berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya di daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, semua program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah selayaknya dapat menjadi strategi untuk pencapaian tujuan otonomi daerah tersebut. Termasuk di antara tujuan program pembangunan nasional adalah program yang memberdayakan perempuan dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu, pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* sebagai satu strategi, pada dasarnya merupakan rangkaian kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender di era otonomi daerah, maka dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan telah memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan,

termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Dengan demikian, melalui strategi yang tepat dapat dikembangkan kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan gender dan mengantar pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Kebijaksanaan pemerintah tersebut salah satunya dituangkan dalam program pemberian bantuan pembangunan kepada masyarakat dimana ada syarat untuk melibatkan penuh kaum perempuan dalam pelaksanaannya. Pada beberapa wilayah, keterlibatan perempuan dalam program tersebut terbukti dapat berjalan seperti yang digariskan dalam panduan pelaksanaannya. Seperti yang telah diteliti oleh Isna dan Firdaus (2004), yang memperoleh hasil yang menarik pada Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, yaitu: *pertama*, perempuan telah dilibatkan dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan program. *Kedua*, keterlibatan tersebut pada awalnya tidak didasari pada kesadaran, karena lebih didasarkan pada pemenuhan ketentuan program dan pelaksana. Akan tetapi, pada tahapan selanjutnya keterlibatan perempuan tersebut lebih dilandasi untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Dalam kondisi desa yang cukup miskin dan sumber daya manusianya pun setara dengan desa-desa sejenis namun adanya kemauan belajar dan partisipasi aktif kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya mengurangi tingkat kemiskinan di desa mereka menjadi sesuatu yang sangat langka dan menarik untuk diungkap. Upaya aktif kaum perempuan dalam pembangunan ini ternyata tetap terlihat pasca program tersebut berjalan bahkan berakhir (Isna dan Firdaus, 2004).

Persoalan di atas menjadi sangat menarik untuk diteliti karena dapat menunjukkan bentuk komunikasi pemberdayaan yang sesuai dan tepat dalam membangkitkan partisipasi kaum perempuan. Kondisi yang terjadi di Desa Tumiyang pada awalnya sama dengan banyak desa di Indonesia yang cenderung tidak aktif dan didominasi oleh kaum laki-laki, akan tetapi keberadaan program pembangunan sebagai pemicu pada akhirnya dapat memberdayakan potensi kaum perempuan. Dapat diasumsikan pada awalnya bahwa potensi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, khususnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Tumiyang, dilakukan menggunakan pendekatan komunikasi yang khas dan unik yang berbeda dengan bentuk komunikasi di tempat lain. Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan yang ingin dijawab dalam tulisan ini.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana bentuk komunikasi pemberdayaan yang dilakukan kaum perempuan untuk membangkitkan partisipasi mereka dalam program pembangunan di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan?"

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi

Partisipasi dalam kehidupan sehari-hari banyak jenisnya, namun Dusseldorp mencoba membuat lima klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi (Dusseldorp dalam Slamet, 1994:10):

1. Partisipasi berdasar pada derajat kesukarelaan

Ada dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. *Pertama, Partisipasi Bebas*. Partisipasi ini terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipasif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi ke dalam dua sub kategori, yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. *Partisipasi spontan* terjadi bila seorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain. *Partisipasi terbujuk*, yaitu bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga partisipasi secara sukarela didalam aktifitas kelompok tertentu.

Partisipasi terbujuk dapat dibagi menurut siapa yang membujuk, seperti:

- a. Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan masyarakat, gerakan koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI).
- b. Badan-badan sukarela di luar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan keagamaan.

- c. Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi sukarela yang berbasis di dalam masyarakat seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kelompok tani.

Kedua, Partisipasi terpaksa oleh hukum. Partisipasi ini terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka. Derajat pemaksaannya berbeda-beda. Misalnya, setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. Petani diharuskan menanam padi varietas tertentu. Pemakaian air tanah dari P2AT harus memenuhi lahannya tanaman pangan dan bukan tanaman perdagangan. Sampai dengan yang lebih lunak, misalnya gerakan wajib belajar, B3B.

2. Partisipasi berdasarkan cara keterlibatan

Dasar klasifikasi ini sangat dikenal didalam Ilmu Politik. Dibedakan menjadi dua jenis yaitu: partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

Partisipasi langsung, terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi, seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut berdiskusi, menyumbangkan tenaganya untuk turut berkampanye dalam PEMILU agar calonnya dapat masuk menjadi anggota DPR. *Partisipasi tidak langsung*, terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan, kepada orang lain yang berikutnya dapat mewakilinya dalam kegiatan-kegiatan pada tingkatan yang lebih tinggi. Pemilihan wakil-wakil di dalam DPR, badan eksekutif mahasiswa, dewan-dewan koperasi dan lain sebagainya adalah contoh bentuk partisipasi ini. Wakil-wakil itu di harapkan dapat memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak yang diwakili. Harapannya adalah agar para wakil itu dapat mengambil bagian di dalam proses pembuatan keputusan pada tingkatan yang lebih tinggi.

3. Partisipasi berdasarkan pada tingkat organisasi

Dusseldorb (dalam Slamet, 1994) membedakan dua macam partisipasi menurut klasifikasi ini yaitu *partisipasi terorganisasi* dan *partisipasi yang tidak terorganisasi*. Partisipasi yang terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Misalnya, bila seorang ketua sudah dipilih, sejumlah pemangku jabatan telah ditentukan dan tata cara pemilihan telah diterima oleh anggota kelompok, bentuk organisasinya dapat sedemikian formal dan

lengkap dengan sejumlah peraturan tertulis. Organisasi yang sedemikian ini banyak ditemukan di pedesaan yang umumnya mengurus bidang-bidang kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan air untuk irigasi (Organisasi Petani Pemakai Air/OPPA di Daerah Istimewa Yogyakarta, Darma Tirta di Jawa Tengah, Mitra Cai di Jawa Barat, Subak di Bali).

Partisipasi yang tidak terorganisasi terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang umumnya karena keadaan yang gawat seperti misalnya sewaktu terjadi kebakaran, gempa, banjir, atau bencana alam yang lain. Namun, bukan hanya untuk peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seperti di atas. Tetapi juga untuk peristiwa-peristiwa yang menggembirakan yang membutuhkan perayaan seperti ulang tahun kemerdekaan, perayaan hari ibu, dan sebagainya. Partisipasi ini sifatnya *ad hoc*. Partisipasi yang tidak terorganisasikan dapat menjadi benih partisipasi yang terorganisasi.

Salah satu sebab perubahan dari partisipasi yang tidak terorganisasi menjadi terorganisasi ialah bila kegiatan itu terulang-ulang sehingga demi kelancaran pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian. Dalam organisasi itu kemudian menjadi jelas siapa melakukan apa. Sebagai contoh, dapat dilihat di Jawa Tengah, organisasi-organisasi yang bergerak dalam pelayanan sesama seperti misalnya perkumpulan pengruki layon, perkumpulan sinoman, dan lain sebagainya.

4. Partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan.

Partisipasi Intensif terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas partisipatif yang tinggi. Menurut Muller (2004) hal ini dapat diukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipasi. *Partisipasi Ekstensif* terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian (events) yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang. Hal demikian ini biasanya terjadi pada organisasi-organisasi yang didasarkan pada partisipasi sukarela, ada kurun-kurun waktu partisipasi intensif yang diselingi kurun waktu yang panjang dari partisipasi ekstensif. Misalnya, suatu proyek pembangunan dapat menumbuhkan pengertian pada para pesertanya, muncul pemimpin yang baik dan aktif atau partisipasi intensif. Tetapi bila proyek telah selesai, pimpinan aktif telah tiada, maka organisasi atau kelompok bisa tergelincir ke dalam waktu partisipasi ekstensif.

Kegiatan-kegiatan organisasi sukarela biasanya disertai slogan atau semboyan-semboyan. Pada awalnya organisasi ini menumbuhkan partisipasi yang intensif di kalangan anggota. Sebab pada dasarnya apakah anggota akan berpartisipasi secara intensif atau ekstensif sangat tergantung pada biaya dan keuntungan yang diharapkan.

5. Partisipasi berdasarkan pada siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat setempat, yaitu terdiri dari penduduk setempat dan pemimpin setempat
- b. Pegawai pemerintah, yaitu terdiri dari penduduk dalam masyarakat dan bukan penduduk
- c. Orang-orang luar, yaitu terdiri dari penduduk dalam masyarakat dan bukan penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

Arti penting Partisipasi

Dalam setiap organisasi apakah organisasi formal, informal, organisasi sukarela maupun organisasi bukan sukarela memandang penting peranan anggotanya. Suatu contoh yang menonjol misalnya, di dalam suatu organisasi/asosiasi (perkumpulan) yang dibangun atas kehendak masyarakat itu sendiri ataupun yang dikehendaki dari “atas” untuk memobilisasi warga masyarakat untuk mencapai suatu tujuan, seperti dalam koperasi misalnya. Pengawasan yang demokratis adalah salah satu dasar dari prinsip-prinsip koperasi. Agar dapat mencapai pengawasan yang demokratis, partisipasi anggota diperlukan sebab tidak mungkin dapat mencapai demokratis tanpa adanya partisipasi.

Arti pentingnya partisipasi anggota juga berkaitan dengan loyalitas anggota. Semakin anggota berpartisipasi semakin tinggi kecenderungan mereka menunjukkan loyalitas. Pada gilirannya, loyalitas akan menghasilkan kohesi kelompok. Lebih lanjut kohesi kelompok ini akan mengakibatkan para anggota tetap setia tinggal sebagai anggota organisasi. Anggota-anggota suatu asosiasi yang memandang asosiasi itu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan-keuntungan material atau keuntungan pribadi yang lain biasanya kurang loyal terhadap asosiasinya dibandingkan dengan anggota yang memandang suatu asosiasi sebagai wadah yang mencerminkan aspirasi idialismenya.

Partisipasi juga meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*), yang menghasilkan suatu “we-feeling” atau identitas dengan asosiasi itu. Arti penting partisipasi menurut Nadarajah (1982) di dalam penelitiannya tentang koperasi petani Iowa. *Pertama*, dengan partisipasi secara aktif, para anggota mampu mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. *Kedua*, partisipasi berperan sebagai fungsi mendidik. Dengan partisipasi secara aktif di dalam suatu organisasi, para anggota dapat mengembangkan keahlian mereka dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dari luar pengetahuan yang telah mereka miliki yang menyangkut pekerjaan atau segi-segi kehidupan yang lain seperti gizi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Partisipasi anggota mempunyai arti penting bagi pengembangan organisasi/asosiasi. Setiap organisasi/asosiasi mempunyai titik berat tujuan sendiri-sendiri. Dengan aktifnya anggota didalam suatu asosiasi maka akan terjadi pertukaran pendapat, komunikasi yang lebih erat, dan “konflik”argumentasi yang lebih menonjol yang pada gilirannya akan membawa serta pengembangan organisasi itu sendiri. Partisipasi juga mempunyai fungsi integrasi. Integrasi ini bukan saja integrasi ke dalam, tetapi integrasi yang mengaitkan antara individu di dalam organisasi itu sendiri dengan masyarakat yang lebih luas.

Ringkasnya, partisipasi menguntungkan baik bagi anggota dan bagi organisasi. Anggota diuntungkan dari hubungan-hubungan yang lebih luas dengan anggota-anggota lain dan dengan para pengurus. Hal demikian ini meningkatkan pengalaman, pengetahuan, pandangan, dan horison mereka. Kedua, para anggota mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi, kepemimpinan, dan pertanggung jawaban melalui proses *learning by doing*. Loyalitas terhadap organisasi diperkuat dengan cara melibatkan para anggota di dalam pembuatan keputusan, yang pada akhirnya menyumbangkan peningkatan solidaritas dan kohesi kelompok. Melalui partisipasi tercipta komunikasi dua arah agar informasi mengalir dari atas ke bawah dan dari bawah keatas. Karena, di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara anggota dan organisasi yang memperkuat dan menguntungkan organisasi.

Tahapan Partisipasi

Secara garis besar partisipasi ada tiga tahapan dalam partisipasi yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Di antara ketiga tahapan itu yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya, ialah partisipasi pada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan orang sekaligus diajak turut serta membuat keputusan. Yang dimaksud dengan membuat keputusan di sini ialah menunjuk secara tidak langsung seperangkat aktivitas tingkah laku yang lebih luas dan bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Ada suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan arti pembuatan keputusan yang menitik beratkan hanya pada kelakuan memilih terhadap berbagai alternatif. Misalnya, seorang individu dalam pemilu dia memilih salah satu dari ketiga tanda gambar, menurut pandangan ini sudah dikatakan telah berpartisipasi di dalam pembuatan keputusan.

Pembuatan keputusan dalam arti yang sesungguhnya ialah sama dengan perencanaan. Dalam hal kegiatan partisipatif perencanaan pembangunan mencakup merumuskan tujuan, maksud, dan target, merumuskan-program-program, menilai program apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber biayanya, yang ringkasnya dapat disebut penyiapan rencana (Slamet, 1994: 24).

Gagasan di atas sejajar dengan pendapat Surbakti (2010) yang menunjuk pada pola umum partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan yaitu:

- a. Keputusan awal
- b. Keputusan dalam proses pembentukan proyek
- c. Keputusan operasional.

Keputusan awal meliputi keputusan tentang (a) kebutuhan dan prioritas proyek, dan (b) desain proyek. Keputusan dalam proses pembentukan proyek meliputi keputusan tentang (a) penetapan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan prioritas, (b) perubahan-perubahan intervensi untuk penyesuaian dengan perkembangan lokal, (c) penetapan lokasi difusi dan diseminasi, dan (d) re-disain proyek. Sedangkan keputusan operasional meliputi (a) diskusi dan sarasehan, (b) pembentukan organisasi dengan anggaran dasar dan rumah tangga, (c) kriteria keanggotaan, (d) penerimaan anggota, (e) pemilihan pemimpin organisasi dan (f) penyampaian pandangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang atau *embadded case study* dengan harapan akan memperoleh gambaran yang mendalam dari peristiwa tersebut (Moleong, 2000). Pemilihan bentuk studi kasus terpancang tersebut dikarenakan penelitian ini sudah menentukan fokusnya. Penelitian ini memfokuskan pada komunikasi pemberdayaan perempuan untuk membangkitkan partisipasi dalam pembangunan khususnya yang terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan upaya memunculkan kemandirian ekonomi di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive. Mereka adalah tokoh masyarakat yang mengerti adanya program pembangunan yang ada yaitu perangkat Desa Tumiyang dan tokoh perempuan yang terlibat sebagai pengelola program pembangunan. Sedangkan informan lainnya adalah masyarakat yang akan ditentukan berdasarkan *snow-ball sampling* dan informasi dari informasi kunci sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara detail kepada informan dengan lentur dan longgar serta berpedoman pada panduan pertanyaan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengamatan dan pengumpulan data berupa dokumen atau data-data sekunder untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

Kronologis Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Tumiyang

Dalam sejarahnya Desa Tumiyang pernah mendapatkan proyek pembangunan antara lain PDMDKE, P3DT dan IDT. Namun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan perempuan sebelumnya karena memang tidak ada aturan yang mengikat. Kaum perempuan di Desa Tumiyang sebelumnya tidak terlibat aktif dalam pembangunan baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan ataupun saat evaluasi keberhasilan. Pelibatan perempuan dalam pembangunan dimulai ketika Desa Tumiyang mendapatkan proyek P2MPD. Pada saat inilah perempuan yang pada masa sebelumnya tidak terlibat atau dilibatkan menjadi harus terlibat dikarenakan ada aturan yang mengharuskan demikian.

Secara umum keterlibatan perempuan Desa Tumiyang dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Keterlibatan dalam perumusan masalah

Sebelum pelibatan dalam perumusan masalah maka ada kegiatan yang mendasari sehingga muncul permasalahan yang hendak diselesaikan. Kegiatan tersebut adalah sosialisasi dan survei. Dari kegiatan sosialisasi dan survei inilah perempuan Desa Tumiyang mendapatkan masukan tentang masalah mendesak dan usulan kegiatan yang menjadi solusi dari masyarakat Desa Tumiyang.

2. Keterlibatan dalam struktur tim sembilan

Dalam struktur tim sembilan ini diwakili oleh empat perempuan sebagai representasi kaum perempuan Desa Tumiyang. Bahkan keterlibatan kaum perempuan dalam tim sembilan ini dirasa sangat menonjol dalam pelaksanaan proyek P2MPD dan juga program-program pembangunan setelahnya.

3. Keterlibatan dalam proses perumusan usulan kegiatan

Berdasar permasalahan yang didapat maka diadakan pembahasan tentang usulan kegiatan sebagai solusi terhadap permasalahan yang diperoleh saat survei sebelumnya.

4. Keterlibatan dalam proses penentuan prioritas kebutuhan

Faktor utama usulan kegiatan dapat dipilih adalah adanya dukungan dari masyarakat.

5. Keterlibatan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan proposal

Yang menarik dalam penyusunan RAB dan proposal muncul kalimat dari informan bahwa sebenarnya perempuan di tim sembilan ini tidak paham karena tidak pernah mengerti bagaimana harus membuatnya. Tetapi dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka tidak dijadikan alasan untuk tidak terlibat dalam penyusunannya. Mereka ikut urun rembug dalam membahas dan menyusun RAB dan proposal pembangunan yang diajukan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Perempuan Desa Tumiyang

Menurut Nadezha Shvedova (1999: 25-26) dapat diklasifikasikan kendala-kendala sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan pengangguran
2. Lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai
3. Buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan pilihan profesi
4. Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional

Kendala-kendala sosial ekonomi yang diungkap tersebut ternyata hampir mirip dengan kondisi yang ada di Desa Tumiyang. Akibatnya, ada pengaruh yang cukup besar dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Tumiyang sebelumnya, antara lain yaitu:

1. Kemiskinan yang angkanya cukup tinggi
2. Tingkat pendidikan yang tergolong tidak tinggi
3. Beban ganda rumah tangga

Sementara untuk faktor pendukung yang menjadi faktor pendorong munculnya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan, antara lain:

1. Kaum perempuan Desa Tumiyang siap dilibatkan meskipun secara materi terbatas, tetapi untuk kerja yang membutuhkan tenaga mereka siap dilibatkan.
2. Muncul kebersamaan dikarenakan program dirumuskan dan diusulkan oleh mayoritas perempuan.
3. Munculnya rasa tersentuh di kalangan bapak-bapak untuk selalu melibatkan ibu-ibu dalam setiap kegiatan.
4. Menjadi bukti bahwa perempuan bila diberi tanggung jawab dan kegiatan dalam bentuk pelibatan mereka akan berhasil. Anggapan ini bahkan menjadi poin positif pasca proyek P2MPD ini selesai. Perempuan tidak lagi pasif atau tidak terlibat justru mereka menawarkan diri apa yang bisa dikerjakan.
5. Hidupnya kegiatan organisasi baik dalam pembentukan Posyandu, Dasawisma, PKK kelompok tidak seperti sebelum adanya proyek P2MPD yang mereka jarang-jarang tampil dan memberikan saran. Kegiatan ini memberi dampak positif bagi organisasi-organisasi yang ada di Desa Tumiyang.

6. Faktor mudahnya perempuan dikumpulkan dibanding laki-laki. Hal ini menjadikan tingkat partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan juga meningkat.
7. Munculnya dominasi perempuan secara positif dalam setiap kegiatan yang terkait dengan lingkungannya. Kaum perempuan Desa Tumiyang menjadi aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan desa seperti dalam musrenbangdes, masuk dalam kepengurusan kelembagaan desa, juga aktif terlibat dalam memberikan saran terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Bentuk Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Menurut Bapak Dartoyo dan Ibu Sri Murdiningsih sebenarnya proyek P2MPD tidak berpengaruh langsung dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian keberadaan proyek mewajibkan kaum perempuan untuk membentuk usaha mandiri atau koperasi simpan pinjam yang dikhususkan buat kaum perempuan. Karena syarat tersebut, proyek P2MPD melandaskan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Pada akhirnya partisipasi perempuan berkembang lebih meluas. Ketika perumusan masalah dan usulan kegiatan berupa pembangunan yang bersifat fisik, seperti contoh saat ada program rehabilitasi TK dan pengaspalan jalan, kaum perempuan tetap terlibat dan tidak ada dominasi oleh laki-laki.

Keterlibatan kaum perempuan Desa Tumiyang dalam pembangunan dapat terwujud dikarenakan telah terjadi komunikasi yang bersifat memberdayakan mereka. Kaum perempuan tidak lagi menjadi pihak yang pasif atau menunggu kaum laki-laki untuk bertindak sebagai inisiator pembangunan. Kaum perempuan melakukan komunikasi secara langsung terutama pada proses penyampaian pesan secara verbal kepada kaum laki-laki terutama para pengambil keputusan tentang pembangunan di desa mereka. Mereka terlibat aktif untuk memberdayakan diri dan potensinya. Mereka tidak merasa inferior di hadapan laki-laki yang biasanya cenderung dominan.

Perasaan untuk mau terlibat membangun tidak hanya yang bersifat non fisik, namun juga yang berhubungan dengan pembangunan yang bersifat fisik yang biasanya didominasi oleh kaum laki-laki. Kondisi ini menjadikan tingkat kesejajaran posisi kaum perempuan naik dan mendekati posisi kaum laki-laki. Hal ini mengakibatkan mentalitas

berkomunikasi kaum perempuan juga dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dalam pembangunan di desa mereka.

Bentuk komunikasi pemberdayaan kaum perempuan Desa Tumiyang yang khas dan unik adalah keikutsertaan mereka secara aktif dalam struktur organisasi desa baik formal maupun nonformal yang merupakan bentuk komunikasi pemberdayaan partisipatif secara nyata. Tidak ada rasa minder bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang itu melibatkan dan berpengaruh kepada kaum perempuan. Keaktifan dalam struktur organisasi ini menunjukkan kaum perempuan sangat percaya diri ketika harus menyampaikan pendapat atau masukan saat proses komunikasi sedang terjadi. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk ini menjelaskan kuatnya pengaruh kaum perempuan untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Bentuk-bentuk komunikasi pemberdayaan perempuan langsung yang terlihat dalam partisipasi mereka pada program pembangunan di Desa Tumiyang antara lain:

1. Perempuan lebih berani mengungkapkan pendapatnya, sesuatu yang jarang terjadi sebelum mendapat proyek P2MPD.
2. Perempuan suka memberikan masukan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungannya. Misal saat becek, maka perempuan akan memberi masukan untuk kerja bakti dan sebagainya yang terkait.
3. Telah hilang rasa minder pada sebagian besar kaum perempuan.
4. Munculnya keberanian untuk menanyakan posisi keterlibatan dalam setiap permasalahan. Seperti dalam proyek ADD (Alokasi Dana Desa), kaum perempuan memberi pelajaran yang baik bagi aparat pemerintahan desa untuk selalu melibatkan mereka.
5. Kesiapan untuk terlibat dalam kegiatan bahkan yang terkait dengan pembangunan fisik seperti dalam kerja bakti. Hal ini bahkan menjadi kebiasaan untuk menjadi pengganti kerja bakti bila suaminya berhalangan.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah:

1. Upaya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dirasa sangat tinggi peranannya.

2. Terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung apa yang menyertai keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan. Bentuk partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan meskipun tidak memberikan pengaruh secara langsung dalam mengurangi tingkat kemiskinan, namun mampu memunculkan kemandirian ekonomi kaum perempuan.
3. Ada beberapa bentuk komunikasi pemberdayaan kaum perempuan yang secara khas terjadi di Desa Tumiyang yaitu: komunikasi berjalan secara langsung terutama pada proses penyampaian pesan secara verbal kepada pihak lain; mentalitas berkomunikasi yang dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dalam pembangunan; keikutsertaan secara aktif dalam struktur organisasi yang merupakan bentuk komunikasi pemberdayaan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Isna, Alizar dan Syah Firdaus. 2004. *Prospek Pemberdayaan Perempuan di Desa Tumiyang Kabupaten Banyumas (Studi Evaluasi Implementasi Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Daerah)*. Purwokerto: Hasil penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muller, Johannes. 2004. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: Gramedia
- Nadarajah, M. 1982. *The Collection and Utilization of Rubber Seed in Ceylon*. RRIC. Bulletin, 4 : 23.
- Shvedova, Nadezha. 1999. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Solo: Sebelas Maret University Press.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.